PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

PERUBAHAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) KABUPATEN BLITAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar Tahun 2023 dapat diselesaikan. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar yang dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar.

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah.

Blitar, 28 Maret 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, ME.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750902 199412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.2.1 Kedudukan	2
1.2.2 Tugas Pokok & Fungsi	3
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	4
1.3.1 Aspek Strategis	4
1.3.2 Permasalahan Utama	10
1.4 Landasan Hukum	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	16
3.1 Analisis Capaian Kinerja	16
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023	37
BAB IV PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Rekomendasi	44

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.2	Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Blitar	2
Tabel 2.1	Visi Misi Bupati Kabupaten Blitar	5
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Blitar	9
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
Tabel 3.1	Definisi Operasional Indikator Tujuan dan IKU Bappeda Litbang	16
Tabel 3.2	Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023	17
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Selama 3 (tiga) tahun	19
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Renstra	22
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	23
Tabel 3.6	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan	25
Tabel 3.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
Tabel 3.8	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan	27
Tabel 3.9	Penghargaan Bappeda Litbang Kabupaten Blitar	36
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Tahun 2023	37

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Profesional, Bersih, dan Tangguh) di Kabupaten Blitar.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar;
2. Mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan fasilitasi perencanaa

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

1.2.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar Bappedalitbang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bappedalitbang

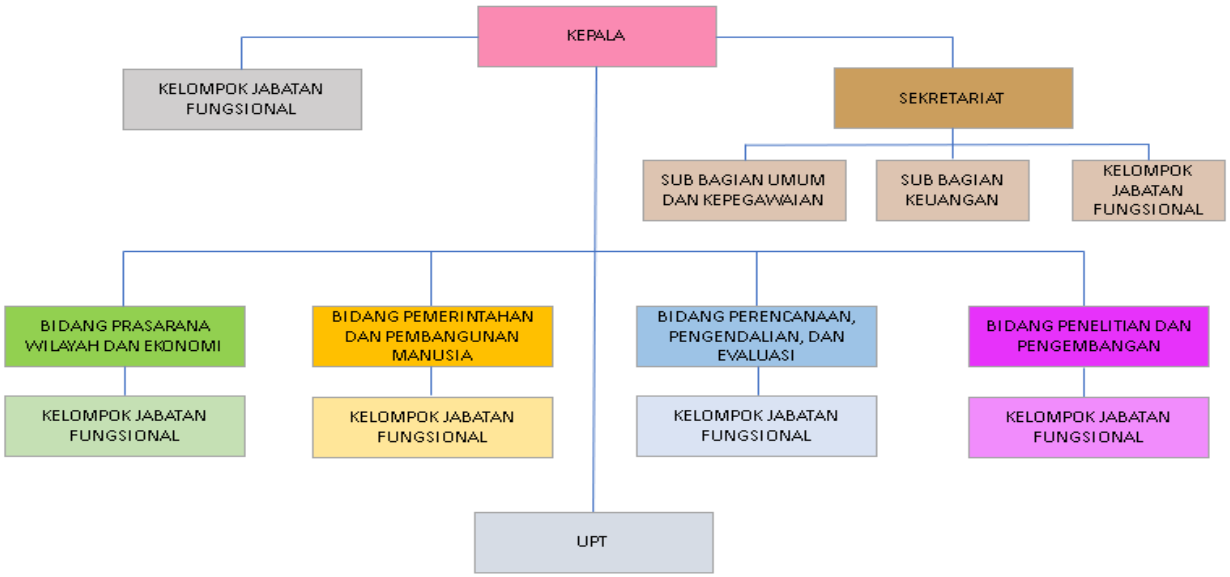

1.2.2 Tugas Pokok & Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, serta tugas pembantuan. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian, sinkronisasi, integrasi, dan fasilitasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah serta dokumen penelitian dan pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
b. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan provinsi dan perencanaan pembangunan nasional;
c. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi penelitian dan pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan penelitian pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi dan penelitian pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat;
d. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah serta pelaksanaan hasil penelitian dan pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
e. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrative serta teknis Badan; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1.3.1 Aspek Strategis

Apabila melihat Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Bappedalitbang mempunyai peran dalam Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatkan Inovasi Perangkat Daerah.

Guna meningkatkan *trust* masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merespon dengan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berupa pelaksanaan perencanaan melalui proses pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, top down dan bottom up yang dalam pelaksanaannya juga memperhatikan aspirasi/usulan dari kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan. Hasil dari aspirasi/usulan musrenbang yang masuk dalam prioritas diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang lebih baik dan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang responsif gender sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Aspek strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi perhatian bagi peningkatan kualitas layanan perencanaan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dijabarkan sebagai berikut :

1. Tindak lanjut atas penyederhanaan birokrasi serta menjawab permasalahan kualitas SDM, maka isu strategis Bappeda Litbang salah satunya adalah perhitungan kebutuhan formasi pejabat fungsional perencana yang tersebar di berbagai perangkat daerah yang berpotensi untuk memperkuat fungsi perencanaan;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta penegakkan standar mutu perencanaan, pengendalian dan evaluasi dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan validitas data;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sebagai upaya pengendalian pencapaian target-target daerah;
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaringan aspirasi dalam proses perencanaan dengan melibatkan sektor swasta, terutama penggalian sumber-sumber pendanaan diluar APBD;
5. Melaksanakan riset dan kajian yang bersifat visioner sebagai upaya menjawab permasalahan dan tantangan kedepan, pemanfaatan potensi dan peluang yang ada, dan memperkuat budaya inovasi.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada.

Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dibuat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021-2026. Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Blitar periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Visi Misi Bupati Kabupaten Blitar 2021-2026

Visi : ***Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)***				
Misi	**Program Bupati-Wakil Bupati**	**Jenis Layanan**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	- Fasilitasi Penetapan Dokumen Perencanaan. - Pendampingan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi	- Belum optimalnya pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi sebagai bahan analisis maupun bahan masukan bagi	- Implementasi system informasi perencanaan dan system informasi evaluasi. - Adanya pokja

		pembangunan kepada Perangkat Daerah. - Layanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah.	perencanaan tahun berikutnya. - Belum optimalnya penyediaan dan pemutakhiran data sectoral oleh Produsen Data.	perencanaan, pengendalian dan evaluasi per perangkat daerah (perumpunan perangkat daerah). - Ketersediaan produk hukum (perbup) dan system informasi pengelolaan satu data.
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Asistensi penyusunan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan, dan harmonisasi, perencanaan pembangunan daerah kepada Perangkat Daerah. - Layanan Data dan Informasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Ekonomi dan SDA, Bidang Fisik dan Prasarana.	- Belum optimalnya analisis terhadap usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sehingga masih terjadi ketidakselarasan output dan outcome yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah akibat kurangnya pemahaman terhadap kaidah perencanaan - Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah.	Ketersediaan program diklat teknis perencanaan.
	Program Penelitian dan Pengembangan	- Penyediaan rekomendasi kebijakan public. - Layanan Pengembangan Iptek	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pengambilan kebijakan public. Belum optimalnya difusi inovasi.	- Ketersediaan SDM Peneliti. - Ketersediaan Roadmap SIDa. - Ketersediaan Rencana Induk Kelitbangan.

Sumber : Renstra Bappeda Kabupaten Blitar, 2021-2026

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (*Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)* terutama misi ke 3 yaitu Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun rencana strategis yaitu : "*Peningkatan Efektivitas Perencanaan Daerah*".

Tujuan tersebut selaras dengan penjabaran dari misi ke 3 Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Blitar 2021-2024 dimana Misi ini terfokus pada Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Profesional, Bersih, dan Tangguh) di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas. Reformasi Birokrasi yang Berkualitas adalah melalui Peningkatan Inovasi Layanan Berbasis Digital, Peningkatan Profesionalitas Aparatur, dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Blitar dapat tercapai.

Memasuki tahun 2022 merupakan tahun kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar merupakan manifestasi komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar yang tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2021-2026.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, maka Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar yang sudah ditetapkan sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 adalah "*Peningkatan Efektivitas Perencanaan Daerah*"
2. Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Adapun Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar yaitu :
   a. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah
   b. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah
   c. Meningkatnya Akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		*Indeks Perencanaan*	6.9	6.9	7.3	7.7	7.9	8.1
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase capaian kinerja RPJMD*	70%	80%	85%	90%	95%	100%
		Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	70%	70%	75%	80%	85%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas BAPPEDA LITBANG	*Skor SAKIP BAPPEDA LITBANG*	A	A	A	A	A	A
Meningkatkan Inovasi Perangkat Daerah		*Indeks Inovasi Daerah*	56,58	62,5	65,15	70,15	72,25	75,15
	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah Dalam Pengambilan Kebijakan Daerah;	*% hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti*	25%	25%	25%	25%	25%	25%

Sumber : Bappeda Litbang, 2023

.

1.3.2 Permasalahan Utama

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar antara lain:

a) Kurangnya pemahaman SDM Perencana terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
b) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan;
d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah;
e) Masih minimnya pemanfaatan iptek dan pengembangan Inovasi Daerah;
f) Kurang tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang valid dan mutakhir;
g) Kurang optimalnya pemanfaatan data dalam pembangunan daerah;
h) Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur sinkronisasi antara perencanaan level kabupaten sampai level desa;
i) Belum terintegrasinya sistem informasi pengendalian dan evaluasi dalam rangka membangun perencanaan dan evaluasi;
j) Belum optimalnya pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh rumpun bidang terhadap perangkat daerah yang diampu;
k) Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan;
l) Kontrol masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan;

1.4 Landasan Hukum

1. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022;
5. Peraturan Bupati Blitar Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022;
6. Rencana Strategis Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
7. Rencana Kerja (Renja) Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2023, dan disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kpeda aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan

Menguraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja, dan Realisasi Anggaran.

Bab IV Penutup

Menjelaskan Kesimpulan, Rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome)* yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kabupaten Blitar guna mewujudkan target kinerja sesuai dengan tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	7.3
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD	80%
		Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	70%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda	Skor SAKIP Bappeda	A
II	Meningkatkan Inovasi Perangklat Daerah	Indeks Inovasi Daerah	65.15
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	50%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda, 2023

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Blitar sebesar Rp 11.878.167.940,- terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 6 kegiatan dan 16 Sub Kegiatan;
2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari 3 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan;

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 3 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan

3.1 Analisis Capaian Kinerja

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan inovasi perangkat daerah dalam pengambilan kebijakan daerah dengan indikator tujuan Indeks Perencanaan dan Indeks Inovasi Daerah tahun 2023, dapat dijelaskan secara rinci definisi operasionalnya sebagai berikut :

Tabel 3.4. Definisi Operasional Indikator Tujuan dan IKU Bappeda Litbang

INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD	DEINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4
Indeks Perencanaan		$= 30\% \left(\frac{\sum Hasil\ Musrenbang\ dalam\ \text{APBD}}{\sum \text{Jumlah Musrenbang sesuai SE Pagu RAPBD}} \text{ x } 100\% \right)$ + $30\% \left(\frac{\sum Jumlah\ Renja\ OPD\ tepat\ waktu}{\sum \text{Jumlah OPD}} \text{ x } 100\% \right)$ + $40\% \left(\frac{\sum Jumlah\ Sasaran\ Kabupaten\ yang\ tercapai}{\sum \text{Jumlah Sasaran Kabupaten}} \text{ x } 60\% \right)$ + $\left(\frac{\sum Jumlah\ Sasaran\ OPD\ yang\ tercapai}{\sum \text{Jumlah Sasaran OPD}} \text{ x } 40\% \right)$ Keterangan : 1-5 kurang 5.1-7.5 cukup 7.6-10 baik	**Bappeda Litbang**
	Persentase capaian kinerja RPMD	$= \frac{\sum \text{capaian kinerja sasaran RPJMD}}{\sum \text{sasaran RPJMD}} \text{ x } 100\%$ Keterangan : Cukup Jelas	Hasil Evaluasi RPJMD
	Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	$= \frac{\sum \text{indikator program pembangunan daerah yang tercapai minimal 75\%}}{\sum \text{indikator program pembangunan daerah}} \text{ x } 100\%$ Keterangan : Jumlah indikator program pembangunan daerah yang tercapai minimal 75% akan dihitung tercapai, jika kurang dari 75% maka belum dihitung mencapai target.	Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program
	Score SAKIP OPD	Penilaian Score SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	Hasil Evaluasi Inspektorat

INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD	DEINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
-1	-2	-3	-4
Indeks Inovasi Daerah		$= \frac{\sum \text{Skor total}}{\sum \text{Skor total maksimum}} \text{ x } 100\%$ Keterangan : Skor total maksimal adalah 250 Skala IID adalah 0 s/d 100 Dengan proporsi aspek sebagai berikut : Satuan Pemda sebesar 40%, dengan 16% merupakan skor jumlah inovasi dan satuan inovasi daerah sebesar 60%	Data Bidang Litbang
	% hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	$= \frac{\sum \text{hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah}} \text{ x } 100\%$ Keterangan : Merupakan perhitungan dari hasil penelitian dan pegembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah pengusul.	Data Bidang Litbang

Sumber : Bappedalitbang, 2023

Dalam dokumen Renstra Bappedalitbang 2021-2026 terdapat ketidakselarasan tujuan antara BAB IV dan BAB VI. Dimana tujuan pada Bab IV “Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah” tetapi tujuan pada Bab VI “Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah”, hal ini dikarenakan kurang optimalnya dalam penyusunan Renstra 2021 - 2026, dan akan menjadi bahan perbaikan pada periode penyusunan Resntra berikutnya. Namun dalam penyusunan dokumen rencana kerja tahun, dokumen pelaporan, dan dokumen lainnya sudah diselaraskan dengan tujuan pada BAB IV Renstra Bappedalitbang 2021-2026. Berikut Hasil screenshoot dokumen Renstra dan Renja yang telah diselaraskan dengan BAB IV.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA LITBANG

Tujuan	Indikator Tujuan	Target					Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	6.9	7.3	7.7	7.9	8.1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase capaian kinerja RPJMD*	80%	85%	90%	95%	100%
								Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	70%	75%	80%	85%	100%
							Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA LITBANG	*Nilai/Predikat SAKIP BAPPEDA LITBANG*	A	A	A	A	A
Meningkatkan Inovasi Perangkat Daerah	*Indeks Inovasi Daerah*	62,5	65,15	70,15	72,25	75,15	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah Dalam Pengambilan Kebijakan Daerah;	*% hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti*	25%	25%	25%	25%	25%

IV-4

Gambar 3.1. Tujuan dan Sasaran pada Bab IV Renstra

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Daerah					Indeks Perencanaan	nilai	NA	6.9		7.3		7.7		7.9		8.1		8.1	
	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan				Persentase capaian kinerja RPJMD	%	98%	80%		85%		90%		95%		100%		100%	
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota			Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	Rp 5,235,041,951	100%	Rp 5,201,469,945	100%	Rp 6,020,080,959	100%	Rp 6,071,643,459	100%	Rp 4,822,806,959	100%	28,563,866,0255.00
			1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	dokumen	19 dok	19 dokumen	Rp 27,019,200	40 dokumen	Rp 127,620,619	40 dokumen	Rp 127,620,619	40 dokumen	Rp 127,620,619	40 dokumen	Rp 127,620,619	179 dok	179,929,000.00

VI-2

Gambar 3.2. Tujuan dan Sasaran pada Bab VI Renstra

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran PelayananBAPPEDALITBANG

Tujuan	Indikator Tujuan	Target					Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	6.9	7.3	7.7	7.9	8.1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase capaian kinerja RPJMD*	80%	85%	90%	95%	100%
								Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	70%	75%	80%	85%	100%
							Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA LITBANG	*Nilai/Predikat SAKIP BAPPEDA LITBANG*	A	A	A	A	A
Meningkatkan Inovasi Perangkat Daerah	*Indeks Inovasi Daerah*	62,5	65,15	70,15	72,25	75,15	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah Dalam Pengambilan Kebijakan Daerah;	*% hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti*	25%	25%	25%	25%	25%

Gambar 3.3. Tujuan dan Sasaran pada Dokumen Renja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.3 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERHITUNGAN	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
		Indeks Perencanaan	**7.3**	{30% ($\frac{131}{132}$ X 100%) + 30% ($\frac{51}{52}$ X 100%) + 40% ($\frac{7}{7}$ X 60%) +($\frac{22}{22}$ x 40%)}	**9.9**	**143.47%**	**Sangat Baik**	**Bappeda Litbang**
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD	85%	$= (\frac{135}{140}\ x\ 100\%)$	96%	112.94%	Sangat Baik	Bappeda Litbang
		Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	75%	$= (\frac{135}{147}\ x\ 100\%)$	91%	121.33%	Sangat Baik	Bappeda Litbang
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda	Skor SAKIP Bappeda	A	Penilaian Inspektorat 80.93	A	100%	Sangat Baik	Inspektorat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERHITUNGAN	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
		Indeks Inovasi Daerah	**65.15**	**Penilaian Mendagri 61.42**	**61.42**	**98.27%**	**Baik**	**Bappeda Litbang**
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	50%	9 kajian / 13 kajian x 100%	70%	140%	Sangat Baik	Bappeda Litbang

Sumber : Bappeda Litbang, 2023

Pada tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dari Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar dengan kategori **Sangat Baik** Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 **Sangat Baik**.

Tabel 3.5 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerjatahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Indeks Perencanaan	**6.9**	**8.9**	**129%**	**6.9**	**9.4**	**136%**	**7.3**	**9.9**	**143.47%**
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD	70%	75%	107%	80%	87,29%	109%	85%	96%	112.94%
		Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	70%	70%	100%	70%	89,07%	127,24%	75%	91%	121.33%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda	Skor SAKIP Bappeda	A	A	100%	A	A	100%	A	A	100%
		Indeks Inovasi Daerah	**60.15**	**56.58**	**94.06%**	**62.5**	**55.51**	**88,81%**	**65.15**	**61.42**	**98.27%**

3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	25%	25%	100%	25%	50%	200%	50%	70%	140%

Sumber : Bappeda Litbang, 2023

Pada tabel diatas adalah perbandingan capaian pada 3 (tiga) tahun terakhir pada level tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2021-2023. Jika dilihat dari realisasi dan capaiannya sudah memenuhi target yang telah ditetapkan atau dengan kategori **Sangat Baik.**

Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan pada setiap indikator tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

a. Indeks Perencanaan;

Indeks perencanaan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0.5 point dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan capaian sasaran kinerja Kabupaten dan sasaran kinerja OPD. Sehingga capaian 9.4 menjadi 9.9 pada tahun 2023. Tercapainya indeks perencanaan didukung oleh indiktator kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tujuan indeks perencanaan berikut indikator yang mendukung tercapainya indeks perencanaan :

1) Persentase capaian kinerja RPJMD;

Capaian tersebut lebih tinggi dari target yang hanya sebesar 85% dapat tercapai 96%. Capaian kinerja masing-masing perangkat daerah tersebut mengalami fluktuasi karena disebabkan kondisi kemampuan keuangan daerah beserta fokus prioritas program kerja tahunan yang harus didanai. Ketercapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi yang lebih lanjut program dan kegiatan pendukungnya dijabarkan dalam penjelasan tabel 3.10

2) Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%

Capaian tersebut lebih tinggi dari target yang hanya sebesar 75% pada tahun ketiga dapat tercapai 91%. Capaian kinerja masing-masing perangkat daerah sangat dipengaruhi fokus prioritas program kerja tahunan daerah maupun Prioritas Pembangunan di Tingkat Provinsi Jawa Timur hingga Prioritas Pembangunan Nasional. Ketercapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi serta Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang lebih lanjut program dan kegiatan pendukungnya dijabarkan dalam penjelasan tabel 3.10

3) Skor SAKIP Bappeda Litbang

Skor SAKIP Bappeda tercapai sebesar 80.93 dengan predikat A naik 0.42

point dibandingkan tahun 2022 sebesar 80.51, Kerjasama untuk menciptakan kinerja yang efektif dan efisien dari seluruh pegawai Bappeda turut serta mendukung tercapainya penilaian SAKIP meskipun masih terdapat penilaian pelaporan kinerja yang belum optimal masih menjadi pekerjaan rumah Bappeda Litbang untuk lebih baik ditahun berikutnya. Ketercapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari sistem akuntabilitas yang terlaksana di Bappedalitbang Kabupaten Blitar.

b. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi daerah tahun 2023 naik menjadi 61.42 dengan kategori sangat inovatif dibandingkan tahun lalu hanya sebesar 55.51. Hal ini untuk dapat dipertahankan dan dilakukan peningkatan agar target akhir tahun dapat tercapai. Tercapainya indeks inovasi daerah didukung oleh indiktator kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan dan dukungan dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Blitar, sehingga pada tahun 2023 dapat mendapat predikat Kategori Sangat Baik dari seluruh Kabupaten di Indonesia mendapat peringkat 32 dari seluruh Kabupaten Kota di Indonesia, salah satu meningkatnya capaian inovasi juga didukung oleh penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan Bidang Penelitian dan Pengambangan yaitu :

1) Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti

Dari 13 kajian yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang pada tahun 2023 yang ditindaklanjuti terdapat 9 kajian. Meskipun capaian belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Blitar tetapi hampir keseluruhan usulan dijadikan bahan masukkan perencanaan. Lebih lanjut kajian yang dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada penjelasan tabel 3.10

Tabel 3.6 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET AKHIR 2026	CAPAIAN	TINGKAT KEMAJUAN
		Indeks Perencanaan	**9.9**	**8.1**	**122%**	**Sangat Baik**
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD	96%	100%	96%	**Baik**
		Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	91%	100%	91%	**Baik**
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda	Skor SAKIP Bappeda	A	A	100%	**Sangat Baik**
		Indeks Inovasi Daerah	**61.42**	**75,15**	**81.72%**	**Baik**
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	70%	25%	280%	**Sangat Baik**

Sumber : Bappeda Litbang, 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui perbandingan capaian IKU tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2026. Dengan tingkat kemajuan **Sangat Baik**.

Tabel 3.7 Membandingkan realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	STANDART NASIONAL	CAPAIAN %
		Indeks Perencanaan	**9.9**	**-**	**-**
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD	96%	-	-
		Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	91%	-	-
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda	Skor SAKIP Bappeda	A	-	-
		Indeks Inovasi Daerah	**61.42**	**-**	**-**
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	70%	-	-

Sumber : Bappeda Litbang, 2023

Standar Nilai Nasional merupakan Standar Nasional yang sudah ditentukan oleh Kementerian pusat, akan tetapi indikator kinerja Bappeda Litbang belum

terdapat Standart Nasional yang ditetapkan meskipun terdapat penilaian langsung yang dilakukan oleh Kemendagri yaitu Indeks Inovasi Daerah tetapi belum terdapat standart nasional nilai yang ditetapkan.

Tabel 3.8 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN %	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
		Indeks Perencanaan	**7.3**	**9.9**	**143.47%**	**Peningkatan capaian sasaran kinerja Kabupaten dan OPD**	
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD	85%	96%	112.94%	Koordinasi yang baik	
		Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	75%	91%	121.33%	Pendampingan dan koordinasi yang baik	
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	A	A	100%	Sudah berhasil tetapi lebih ditingkatkan kajian yang terlaksana untuk ditindaklanjuti	
		Indeks Inovasi Daerah	**65.15**	**61.42**	**98.27%**	**Kurangnya komitmen Kepala OPD**	**Komitmen bersama**
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda	Skor SAKIP Bappeda	50%	70%	140%	Sudah Behasil perlu ditingkatkan lebih baik untuk AA	

Sumber : Bappeda Litbang, 2023

Tabel 3.9 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN %	ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	CAPAIAN %	TINGKAT EFISIENSI
		Indeks Perencanaan	**7.3**	**9.9**	**143.47%**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD	85%	96%	112.94%	1.694.484.700	1.510.710.941	89.15%	126.68%
		Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	75%	91%	121.33%	1.399.977.160	1.101.456.983	78.68%	154.2%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda	Skor SAKIP Bappeda	A	A	100%	2.621.428.140	2.292.725.832	87.46%	114.34%
		Indeks Inovasi Daerah	**65.15**	**61.42**	**98.27%**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	50%	70%	140%	2.412.700.000	2.241.359.352	92.90%	150.69%

Sumber : Bappeda Litbang, 2023

Tabel 3.10 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiata	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkat kan Kualitas Perencanaan Pemba ngunan Daerah	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%		
		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	25 dokumen	27 dokumen	Terdapat 2 dokumen tambahan berdasrkan hasil review inspektorat menyusun proses bisnis dan manajemen risiko sesuai peraturan sehingga capaian menjadi 27 dokumen.	
		1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 dokumen	27 dokumen	Terdapat 2 dokumen tambahan berdasrkan hasil review inspektorat menyusun proses bisnis dan manajemen risiko sesuai peraturan sehingga capaian menjadi 27 dokumen.	
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 dokumen	12 dokumen		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiata	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			perangkat daerah yang tepat waktu				
		2.1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen		
		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	30 Orang	30 Orang		
		3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang		
		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan		
		4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket		
		4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiata	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	2 paket		
		4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket		
		4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket		
		4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen		
		4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276 laporan	186 laporan	Intensitas jumlah rapat yang lebih besar	
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan		
		5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		
		5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiata	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kantor yang Disediakan				
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan		
		6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	30 unit		
		6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	117 Unit	74 unit	Jumlah peraltan dan mesin yang dipelihara 74 lainnya masih dalam kondisi baik belum memerlukan pemeliharaan	
		6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0 unit	Rehabilitasi Gedung tidak jadi dilaksanakan	
		II PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	6 dokumen	9 dokumen	Capaian 9 dokumen : 4 dok evaluasi RKPD, 4 Dok DAK, dan 1 LKPJ 2022.	
			Persentase	80%	100%	Seluruh program	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiata	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah			prioritas didanai APBD	
			Tingkat pemanfaatan data	55%	58%		
		1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah	80%	100%	Seluruh program prioritas didanai APBD	
		1.1 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara		
		1.2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara		
		1.3 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	110 Usulan	550 Usulan	Setiap kecamatanTerdapat 5 prioritas setiap prioritas 5 usulan	
		1.4 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD /RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	6 Dokumen	Terdapat tambahan dokumen Ranwal RPJPD	
		2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Tingkat keterisian data SIPD	55%	58%		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiata	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pembangunan Daerah					
		2.1 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	53 Orang	53 Orang		
		2.2 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku		
		3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	9 dokumen	9 dokumen		
		3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan		
		3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	5 Laporan		
		III PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program PD yang tercapai	75%	91%		
		1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	Persentase indikator program	89.07%	91%		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiata	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pembangunan Manusia	PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				
		1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	195 dokumen	195 dokumen		
		1.2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	62 Laporan	62 Laporan		
		1.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	63 dokumen	63 dokumen		
		1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan	18 Laporan	18 Laporan		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiata	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Manusia				
		2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase indikator program PD mitra bidang perekonomian dan SDA	89.07%	91%		
		2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	21 dokumen	21 dokumen		
		2.2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan		
		2.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	14 dokumen	14 dokumen		
		2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 laporan	4 laporan		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiata	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase indikator program PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan	89.07%	91%		
		3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	14 dokumen	14 dokumen		
		3.2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 laporan	4 laporan		
		3.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	28 dokumen	28 dokumen		
		3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	8 laporan	8 laporan		

Berikut analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program tahun 2023 urusan perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar diuraikan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu *rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota* dengan target 100% dapat tercapai 100%, ketercapaian naik 1% dibandingakan dengan capaian tahun 2022. Hal ini didukung dengan ketercapaian 6 (enam) kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah sebagai berikut :

   a. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**.

      Kegiatan ini mencakup kegiatan kesungraman dan juga pelaporan keuangan dengan indikator *Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan"* yang pada akhir tahun anggaran 2023 terealisasi sebanyak 27 dokumen. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator *"Jumlah Dokumen yang Disusun"* yang ditargetkan sebanyak 25 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 27 dokumen, diantaranya Dokumen Perencanaan Bappedalitbang (Perubahan Renstra 2021-2026, Renja 2024, Renja Perubahan 2023, Perjanjian Kinerja 2023, Perjanjian Kinerja Perubahan 2023, PUG Gender, Matriks Risiko, SPBE, dan SPIP), Dokumen Pelaporan (LKPJ Bappedalitbang TA 2022, LKjIP Bappedalitbang, Laporan Kinerja 2022, LPPD Bappedalitbang, Pelaporan semesteran RP4GN, dan laporan PUG Gender), Dokumen Evaluasi (RKPD, Sakip, PMPRB, dan APIP Kinerja), serta Dokumen Keuangan (LRA, CALK, Laporan keuangan tiap triwulan, Pelaporan BMD).

   b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

      Dengan indikator kinerja *Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* dengan target 12 dokumen tercapai 12 dokumen terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan indikator *Jumlah dokumen Koordinasi dan*

Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan target 12 dokumen dapat terealisasi 12 dokumen.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah *Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah* yang pada akhir tahun anggaran 2023 terealisasi sebanyak 30 orang dikarenakan pada bulan November 2023 terdapat mutasi pegawai sehingga bertambah satu pegawai. Kegiatan ini didukung 1 (satu) sub kegiatan, yaitu: Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan indikator kinerja *Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* yang ditargetkan sebanyak 30 orang, yang mengikuti bimtek sejumlah 30 orang.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah *Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel* yang pada tahun 2023 dapat terlaksana penyediaan operasional administrasi umum kantor selama 12 bulan, yaitu : komponen listrik, peralatan kantor, bahan logistic, bahan cetak, bahan bacaan, dan operasional penyelenggaraan rapat. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 7 sub kegiatan, meliputi :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, dengan indikator kinerja *Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan* dengan target 1 paket tercapai 1 paket
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator kinerja *Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan* dengan target 2 paket dapat terealisasi sejumlah 1 paket peralatan dan 1 paket perlengkapan kantor.
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan indikator kinerja *Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan* dengan target 2 paket. Terealisasi sejumlah 2 paket peralatan rumah tangga.

4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator kinerja *Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan* yang dengan target 2 paket dapat terealisasi sejumlah 2 paket logistik kantor.
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan indikator kinerja *Jumlah dokumen barang cetakan dan penggandaan yang disediakan* dengan target 1 paket dapat terealisasi sejumlah 1 paket barang cetakan dan penggandaan.
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan indikator kinerja *Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan* yang ditargetkan sebanyak 1 paket dapat terealisasi sejumlah 1 paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator kinerja *Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD* dengan target 276 laporan dalam satu tahun dapat terealisasi sebanyak 186 laporan. Dikarenakan Intensitas jumlah rapat dengan kapasitas besar lebih banyak.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan ini adalah *Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* dapat terealisasi penyediaannya selama 12 bulan, meliputi : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor Bappedalitbang serta penyediaan kebutuhan tenaga non teknis untuk menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator kinerja *Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan* dengan target 12 laporan dalam satu tahun dapat terealisasi sebanyak 12 laporan.
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan indikator kinerja *Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan* dengan target sebanyak 12 laporan dapat terealisasi sebanyak 12 laporan.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan ini adalah *Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* dapat terpenuhi penyediaannya selama 12 bulan, meliputi : pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan pemeliharaan peralatan kantor. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, karena 1 sub kegiatan yaitu pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya tidak jadi dilaksanakan karena adanya kebijakan anggaran, sehingga hanya 2 sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan indikator kinerja *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* dengan target 30 unit dapat tercapai 30 unit, sebab terdapat kendaraan yang membutuhkan pemeliharaan yang lebih intensif.

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator kinerja *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara* dengan target 117 unit hanya tercapai 74 unit, sebab yang membutuhkan pemeliharaan hanya 74 unit, sedangkan lainnya masih kondisi layak dan tidak membutuhkan pemeliharaan selain itu juga untuk efisiensi anggaran:

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Terdapat 3 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, indikator kinerja tersebut meliputi :

i. *Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah* dengan target pada dokumen perencanaan daerah dan perjanjian kinerja Kepala Bappedalitbang sebesar 80% tercapai 100%.

ii. *Tingkat pemanfaatan data* Realisasi capaian kinerja program Tahun 2022 untuk indikator kedua didapatkan rata-rata tingkat pemanfaatan data sebesar 58% dari target yang telah ditetapkan yaitu
55%.

iii. *Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah* Realisasi capaian kinerja 9 dokumen dari target 6 dokumen, hal ini dikarenakan laporan evaluasi per trieulan bukan semesteran, dokumen tersebut meliputi : 4 dokumen evaluasi RKPD, 4 pelaporan triwulan DAK tahun 2023 dan 1 Dokumen LKPJ 2022.

Untuk mendukung Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Indikator kegiatan ini adalah *Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan* dengan target sebesar 80% dapat direalisasikan sebesar 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi :

1) Pelaksanaan Konsultasi Publik, dengan indikator kinerja *Jumlah berita acara konsultasi publik* dengan target 1 Berita Acara dapat terealisasi sebanyak 1 Berita Acara.

2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja *Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten dengan target* sebanyak 1 Berita Acara dapat terealisasi sebanyak 1 Berita Acara.

3) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dengan indikator kinerja *Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan* yang ditargetkan sebanyak 110 usulan dalam satu tahun dapat terealisasi sebanyak 550 usulan setiap kecamatan mengusulkan 25 kegiatan prioritas yang terverifikasi.

4) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja *Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan* dengan target sebanyak 5 dokumen dapat terealisasi sebanyak 6 dokumen meliputi : Ranwal RKPD 2024, Dokumen RKPD 2024, RKPD Perubahan 2023, Renja 2024, Renja Perubahan 2023, dan Ranwal RPJPD 2025-2045.

b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan ini adalah *Tingkat keterisian data di SIPD* yang pada tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 58% dari target yang ditetapkan 55%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi:

1) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD, dengan indikator kinerja *Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi* yang ditargetkan sebanyak 53 orang dapat direalisasikan sebanyak 53 orang, berasal dari : 31 OPD dan 22 kecamatan, masing-masing OPD dan kecamatan mengirim 1 orang untuk mengikuti pembinaan.
2) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja *Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan* yang ditargetkan sebanyak 1 buku dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dapat terealisasi sebanyak 1 buku meliputi : Buku Profil Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2022.

c. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator kegiatan ini adalah *Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah* dapat direalisasikan sebanyak 9 dokumen, diantaranya : LKPJ TA 2022, Laporan realisasi DAK TA 2022 Triwulan I-IV, dan Evaluasi RKPD triwulanan. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi :

1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja *Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan* yang ditargetkan sebanyak 4 laporan dalam satu tahun. dapat terealisasi sebanyak 4 laporan yaitu laporan realisasi DAK Triwulan.
2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator *Jumlah rekomendasi hasil monev* yang ditargetkan sebanyak 5 dokumen dapat direalisasikan sebanyak 5 dokumen meliputi : LKPJ TA 2022 dan 4 evaluasi RKPD Triwulan.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator capaian kinerja program ini adalah *Persentase indikator program PD yang tercapai.* Realisasi kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2023 sebesar 91%. Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Indikator kegiatan ini adalah *"Persentase indikator program PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia"* yang pada tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar 91%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi :

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)**,** dengan indikator kinerja *Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)* yang ditargetkan sebanyak 195 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 195 dokumen, dokumen yang dikoordinir yaitu : RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJPD dikalikan OPD rumpun pemerintahan.
2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, dengan indikator kinerja *Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan"* yang ditargetkan sebanyak 62 laporan dapat terealisasi sebanyak 62 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan OPD rumpun pemerintahan.
3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)**,** dengan indikator kinerja *Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)* yang ditargetkan sebanyak 63 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 63 dokumen, dokumen yang dikoordinir yaitu :

RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJPD dikalikan OPD rumpun pembangunan manusia.

4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan indikator kinerja *Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia* yang ditargetkan sebanyak 18 laporan dapat terealisasi sebanyak 18 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan OPD rumpun pembangunan manusia.

Selain itu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia juga melakukan 2 kegiatan Penyusunan dokumen yaitu :

- ✓ Penyusunan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Kabupaten (RIDPK) Pansela Kabupaten Blitar.

  Dokumen RIDPK Pansela dan NA Rancanagan Peraturan Bupati Blitar memuat :

  - ✓ Proyeksi pertumbuhan DPK Pansela
  - ✓ Kebutuhan pembangunan DPK Pansela
  - ✓ Visi, misi, rekomendasi arah kebijakan serta strategi Pembangunan DPK Pansela
  - ✓ Kerangka Regulasi dan Pendanaan
  - ✓ Rekomendasi scenario pembangunan DPK Pansela.
- ✓ Penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 Kabupaten Blitar.

  Berdasarkan hasil analisia maka analisa prioritas Intervensi (Berdasarkan data miskin ekstrim) yaitu :

  1. Peningkatan Pendapatan dan Kesempatan Kerja:

  Pekerjaan: Dengan 2.461 orang belum/tidak bekerja, fokus utama adalah pada penciptaan lapangan kerja dan pelatihan keahlian. Ini bisa meliputi program kewirausahaan untuk 567 wiraswasta dalam data. Pertanian: 1,323 petani/pekebun dan 735 buruh tani/perkebunan menunjukkan kebutuhan akan intervensi di sektor pertanian, seperti akses ke teknologi pertanian, pelatihan dalam pengelolaan pertanian berkelanjutan, dan akses ke pasar.

2. **Pendidikan dan Pelatihan:**

   Pelajar/Mahasiswa: Terdapat 1.115 pelajar/mahasiswa yang memerlukan dukungan pendidikan, seperti program beasiswa dan fasilitas belajar. Pelatihan Kejuruan: Untuk pekerja seperti tukang kayu sebanyak 29 orang dan tukang batu sebanyak 24 orang, program pelatihan kejuruan bisa meningkatkan keterampilan dan prospek pekerjaan mereka.

3. **Perbaikan Kondisi Perumahan:**

   Kondisi Rumah: Dengan jumlah signifikan rumah yang tidak memenuhi standar (misalnya, 5,950 rumah dengan luas lantai > 30 m2 yang mungkin memerlukan perbaikan), program perbaikan rumah dapat menjadi prioritas. Kepemilikan Rumah: Mengingat 6,564 rumah milik sendiri dan beberapa yang kontrak/sewa (185) atau bebas sewa (2,454), bantuan dalam pembangunan atau perbaikan rumah bisa sangat membantu.

4. **Kesehatan dan Kesejahteraan:**

   Fasilitas MCK: Dengan 1,451 keluarga tanpa akses ke fasilitas MCK, penyediaan fasilitas sanitasi menjadi prioritas. Asuransi Kesehatan: Program asuransi kesehatan mungkin diperlukan, terutama mengingat jumlah pekerja harian lepas sebanyak 607 orang yang mungkin tidak memiliki jaminan kesehatan.

5. **Akses ke Sumber Daya Dasar:**

   Penerangan: 6,408 rumah dengan penerangan listrik PLN 450 Watt atau tanpa meteran menunjukkan kebutuhan akan peningkatan akses ke sumber listrik yang stabil. Air Minum: Dengan 6,006 rumah yang menggunakan sumur sebagai sumber air minum, ada kebutuhan untuk meningkatkan akses ke air minum yang lebih aman dan layak.

6. **Dukungan Ekonomi Mikro:**

   Wiraswasta dan Pedagang: Mengingat jumlah wiraswasta sebanyak 567 orang dan pedagang sebanyak 230 orang, bantuan modal, pelatihan bisnis, dan akses ke pasar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi mikro.

7. Intervensi Khusus Berdasarkan Kepemilikan Aset:

Aset Ternak dan Lahan: Dukungan untuk 122 pemilik ternak sapi > 2 ekor dan 13 pemilik lahan > 140 m2 dapat termasuk bantuan untuk meningkatkan produksi atau pengelolaan asset.

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)

Indikator kegiatan ini adalah *"Persentase indikator program PD mitra bidang perekonomian dan Sumber daya alam* yang pada tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar 91%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi :

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)**,** dengan indikator kinerja *Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)* yang ditargetkan sebanyak 21 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 21 dokumen, dokumen yang dikoordinir yaitu : RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJPD dikalikan OPD rumpun perekonomian.
2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, dengan indikator kinerja *Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian* yang ditargetkan sebanyak 6 laporan dapat terealisasi sebanyak 6 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan OPD rumpun perekonomian.
3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)**,** dengan indikator kinerja *Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)* yang ditargetkan sebanyak 14 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 14 dokumen, dokumen yang dikoordinir yaitu : RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJPD dikalikan OPD rumpun SDA.

4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan indikator kinerja *Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia* yang ditargetkan sebanyak 4 laporan dapat terealisasi sebanyak 4 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan OPD rumpun SDA.

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Indikator kegiatan ini adalah *"Persentase indikator program PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia"* yang pada tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar 91%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi :

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)**,** dengan indikator kinerja *Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)* yang ditargetkan sebanyak 14 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 14 dokumen, dokumen yang dikoordinir yaitu : RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJPD dikalikan OPD rumpun infrastruktur.
2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dengan indikator kinerja *Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur* yang ditargetkan sebanyak 4 laporan dapat terealisasi sebanyak 4 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan OPD rumpun infrastruktur.
3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)**,** dengan indikator kinerja *Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)* yang ditargetkan sebanyak 28 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 28 dokumen, dokumen yang dikoordinir yaitu : RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJPD dikalikan OPD rumpun kewilayahan.

4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, dengan indikator kinerja *Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan* yang ditargetkan sebanyak 8 laporan dapat terealisasi sebanyak 8 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan OPD rumpun kewilayahan.

Selain itu Bidang Prasarana Wilayah Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) juga melakukan 2 kegiatan Penyusunan dokumen yaitu :

- ✓ Penyusunan Indeks Disparitas Wilayah Kabupaten Blitar

  Berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan beberapa strategi untuk pengurangan disparitas wilayah maka beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu :

  - ✓ Peningkatan konektifitas dan aksesbilitas Kawasan

    Meningkatkan aksesibilitas antara pusat kegiatan dengan daerah belakangnya, sehingga *spread effect* dapat terjadi dan daerah belakang agar mampu meningkatkan pemerataan pembangunan.
  - ✓ Pusat kegiatan baru

    Meningkatkan pemerataan pembangunan diupayakan melalui pengembangan pusat kegiatan baru yang dapat menjadi pusat ekonomi yang berdampak positif pada sekitarnya.
  - ✓ Pusat pertanian

    Mengembangkan pusat-pusat pertanian dan penunjangnya sebagai sarana pengembangan koridor ekonomi local.
  - ✓ Peningkatan kualitas SDM

    Mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan yang berfokus pada pemberian bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi.
- ✓ Penyusunan Data Infrastruktur Penunjang KPBU di Kabupaten Blitar.

  Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, analisis kepatuhan, analisis nilai manfaat uang dan analisis kelayakan ekonomi terdapat 7 (tujuh) potensi dan prioritas penyediaan infrastruktur di Kabupaten Blitar yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU meliputi :

- ✓ Pembangunan SPAM Regional
- ✓ Pembangunan TPA Regional
- ✓ Pembangunan IPLT
- ✓ Pembangunan Pansela
- ✓ Pengembangfan jalur perkeretaapian
- ✓ Pengembangan pusat Kesehatan (RS Khusus)
- ✓ Penyediaan infrastruktur jaringan, telekomunikasi, kabel dan nirkabel

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Indikator kinerja program ini yaitu *Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah* dengan target capaian kinerja 25% dapat terealisasi sebesar 66.67%. Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 4 kegiatan, yaitu :

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Indikator kinerja ini adalah *persentase hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah* terealisasi sebesar 70% dari target yang ditetapkan 70%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 3 sub kegiatan meliputi :

1) Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, dengan indikator kinerja *Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum* yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dapat direalisasikan sebanyak 1 dokumen yaitu : dokumen kajian *Dampak Sosial dan Ekonomi Pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) di Wilayah Selatan Kabupaten Blitar,* dari hasil kajian dapat disimpulkan sebagai berikut :
   - ✓ Pembangunan Jalan Pansela belum sepenuhnya dapat berdampak pada penurunan biaya transportasi maupun peningkatan akses pasar bagi rumah tangga dan pelaku usaha di sekitarnya. Hal ini dikarenakan peran pembangunan infrastruktur, seperti Jalan tergolong berdampak secara jangka panjang sehingga pada kajian yang dilakukan belum dapat diketahui dampaknya secara signifikan.

- ✓ Terdapat faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga di sekitar pembangunan Jalan Pansela, yaitu (i) status perkawinan; (ii) jenis kelamin; (iii) usia; (iv) tingkat pendidikan; (v) status kesehatan; (vi) akses terhadap keuangan; dan (vii) penggunaan telepon sekaligus internet.
- ✓ Tantangan dan hambatan secara sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari adanya pembangunan Jalan Pansela adalah ketidaksiapan secara sumber daya manusia untuk menerima adanya pengembangan secara infrastruktur sehingga menimbulkan dampak negatif adanya pembangunan Jalan Pansela, seperti tindak kejahatan dan peluang adanya *underground economy.*
- ✓ Strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendorong dampak positif dari adanya pembangunan Jalan Pansela adalah dengan fokus pada *growth-oriented strategy*

2) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dengan indikator kinerja *Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik* dengan target sebanyak 1 laporan dapat direalisasikan sebanyak 1 laporan yaitu laporan Pemeliharaan dan Pengembangan Web Aplikasi BIG RICE (*Blitar Regency Research and Innovation Center*) yang merupakan inovasi sentralisasi data kelitbangan yang meliputi kajian dan inovasi melalui aplikasi website BIG RICE yang bertujuan untuk menyediakann media inventarisasi data kelitbangan (database) yang meliputi kajian dan inovasi secara tersentral. Serta pemeliharaan dan pengembangan Web Aplikasi PRADAH merupakan jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Blitar yang dapat diakses oleh umum dan terbuka.

3) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan, dengan indikator kinerja *Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan* yang ditargetkan sebanyak 1 laporan. dapat direalisasikan sebanyak 2 laporan yaitu Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, kajian yang dilaksanakan secara deskriptif kuantitatif terkait data asset dan potensi

pendukung dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk rencana pemanfaatan sebagai *Bisnis center, creative hub, BDS serang, Meeting point* yang disesuaikan untuk kearifan lokal agar menambah PAD Kabupaten Blitar. dan Ranperda tentang penyelenggaran Inovasi di Kabupaten Blitar yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Inovasi di Kabupaten Blitar yang akan dibahas dalam Propemperda tahun 2024.

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Indikator kinerja *Persentase hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah"* dengan target capaian kinerja sebanyak 70% dapat direalisasikan sebesar 70%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi :

1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial dengan indikator dengan target 1 dokumen dapat terelaisasi 1 dokumen yaitu Kajian Pengelolaan Panti Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dengan adanya kajian ini dapat dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mampu menyusun program kegiatan dan strategi Pengembangan Fasilitas Pelayanan Di Luar Sektor Kesehatan Bagi Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menjadi pemenuhan kewajiban *(mandatory)* terhadap tugas dan fungsinya lebih akuntabel. Memberikan pemerintah daerah dasar dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan bagi penanganan ODGJ mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing. Selain itu dapat digunakan organisasi perangkat daerah terkait sebagai masukan penting untuk mampu menyusun program dan kegiatan pendukung Pengembangan Fasilitas Pelayanan Di Luar Sektor Kesehatan Bagi Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ); termasuk lembaga pengawasan seperti DPRD dan Inspektorat sebagai *assurance* terhadap kualitas dan akuntabilitas capaian Kinerja Pengembangan Fasilitas Pelayanan Di Luar Sektor Kesehatan Bagi Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh lembaga *independen* dan *professional*.

2) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dengan indikator *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata* dengan target 1 dokumen dapat terealisasi 1 dokumen yaitu Penyusunan Masterplan Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Kabupaten Blitar, dari hasil dapat disimpulkan Berdasarkan hasil analisis berbasis Data Primer (wawancara dan survey lokasi), serta analisis Studi Kelayakan terdahulu maka Kajian Masterplan ini di tampilkan dalam suatu Rancangan Pelaksanaan KST di Kabupaten Blitar. Dimana rancangan yang akan di buat akan selaras dengan program pemerintah pusat (BRIN-Badan Riset Inovasi Nasional), yang tertuang dalam bentuk BRIDA Kabupaten Blitar, dengan mengacu pada IDSD (Indek Daya Saing Daerah) yang berujung pada peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Blitar. Selanjutnya rancangan ini juga akan menampilkan program-program yang akan dilakukan oleh KST, baik dalam jangka pendek, menengah dan Panjang, yang akan disampaikan dalam bentuk Roadmap KST. Tentunya akan di tampilkan juga program2 akselerasi sebagai Program Quickwin, sehingga KST dapat langsung beroperasi, sesuai dengan kapaistas dan kapabilitas saat ini. Untuk hal tersebut Master Plan yang akan dibangun, berbasis pada Studi Kelayakan yang telah di buat oleh Kabupaten Blitar.

c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Indikator kinerja *Persentase hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah* dengan target capaian kinerja sebanyak 70% dapat direalisasikan sebesar 70%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dengan indikator *Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Perhubungan* yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dapat terealisasi sebanyak 1 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 pelaksanaan kajian perlintasan sebidang kereta api dan jalan di Kabupaten Blitar dapat disimpulkan bahwa berdfasarkan 8 sampel perlintasan sebidang yang diambil dari 61 populasi perlintasan sebidang derajat kejenuhannya adalah A dan B, derajat kejenuhan A memiliki arti kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi dan pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan, sedangkan derajat kejenuhan B

artinya arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas dan pengemudi memiliki kebebasan untuk memilih kecepatan. Sehingga dapat disimpylkan bahwa ruas jalan di perlintasan sebidang cukup stabil. Tetapi kondisi geometric perlintasan sebidang di Kabupaten Blitar dengan lebar jalan kurang dari 3.5 meter sangat rawan terhadap kecelakaan.

d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah *Persentase hasil kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut* dengan target capaian kinerja sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan meliputi :

1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang teknologi dan Inovasi, dengan indikator *Jumlah dokumen penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi* yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dapat direalisasikan sebanyak 1 dokumen yaitu laporan pelaksanaan Lomba Kreatifitas Inovasi dan Teknologi Kabupaten Blitar. Lomba Krenotek dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori lomba yaitu :

Kategori I: Perangkat Daerah, Unit Khusus, kecamatan, puskesmas, dan kelurahan 19 inovasi; dengan pemenang lomba krenotek :

- Juara 1 SIMPUSTRONIK dari Dinas Kesehatan (Drs. Luluk Ismojo M.Si.
- Juara 2 SIDAKSOS dari Dinas Sosial (Bambang Dwi Purwanto, SSTP., MM.
- Juara 3 SI DOKAR MAS dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi (Indriati A.Md. Kes., dkk)

Kategori II: Pelajar (SMP dan SMA) 18 inovasi, dengan pemenang lomba :

- Juara 1 Pembangkit Listrik Tenaga PIKO HIDRO (PLTHP) dari SMP Negeri 2 Gandusari (Nanda Tri Saputra, dkk)
- Juara 2 PUOLUR dari SMA Negeri 1 Kesamben (Rara Regita C. dan Reni Mujarista)
- Juara 3 DOMINIQ dari SMK Darul Huda (Ikfina Fata A., dkk)

Kategori III: Mahasiswa dan Umum 25 inovasi, dengan pemenang lomba :

- Juara 1 BAGAS PATI dari Desa Sukorejo, Kec. Wates (Iwan Pitono, ST)

- Juara 2 MOMENTKU dari Desa Kolomayan, Kec. Wonodadi (Nur Lailatul Mukaromah, S.H)
- Juara 3 SIAP UANG KE MASJID DAKUR dari Desa Kemloko, Kec. Ngelgok (Saiful Mujab)

2) Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reolikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, dengan indikator *Jumlah Laporan Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reolikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi* dengan target 1 laporan dapat terealisasi 1 laporan
3) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif, dengan indikator *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif* dengan target 1 laporan dapat terealisasi 1 laporan yaitu hasil rencana induk kelitbangan.
4) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dengan indikator *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan* dengan target 1 laporan dapat terealisasi 1 laporan yaitu laporan monev inovasi daerah tahun 2023. Kesimpulan dari monev inovasi adalah Inovasi pemerintahan memainkan peran krusial dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan menyediakan solusi untuk tantangan kompleks. Contoh-contoh inovasi seperti pemerintah digital, open government, dan smart cities telah membuktikan manfaatnya di berbagai negara. Namun, tantangan seperti pengelolaan perubahan, keamanan dan privasi data, serta ketimpangan akses teknologi perlu diatasi agar inovasi pemerintahan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan adanya tantangan tersebut maka penerapan inovasi dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Blitar dapat mencapai beberapa manfaat, antara lain:
   a. Meningkatkan kepuasan masyarakat: Inovasi pemerintahan dalam pelayanan public dapat menghasilkan layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Hal ini akan

meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga.

b. Meningkatkan efisiensi: Melalui penggunaan teknologi, proses otomatisasi, dan pengintegrasian layanan, inovasi pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Ini dapat mengurangi biaya, waktu, dan sumber daya yang diperlukan, sehingga menghasilkan penggunaan yang lebih efektif dari anggaran publik.
c. Memperluas aksesibilitas: Inovasi pemerintahan dapat mengatasi hambatan akses yang dialami oleh sebagian masyarakat dalam mendapatkan layanan publik. Dengan menggunakan teknologi seperti aplikasi seluler atau portal daring, pemerintah dapat memberikan akses yang lebih mudah dan luas kepada warga, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik.
d. Mendorong partisipasi masyarakat: Inovasi pemerintahan dalam pelayanan publik dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan dan peningkatan layanan. Melalui mekanisme konsultasi publik atau platform partisipatif, warga dapat memberikan masukan, umpan balik, atau bahkan berkolaborasi dalam merancang solusi yang lebih baik.
e. Peningkatan akuntabilitas: Inovasi pemerintahan juga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan publik dengan memperkuat transparansi, pengawasan, dan pelaporan.

5) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual* dengan target 1 laporan dapat terealisasi 1 laporan yaitu laporan hasil sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 9 November 2023 di Ruang Pola Bappedalitbang dengan narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun Penghargaan yang diperoleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar Tahun 2023 serta mendukung capaian kinerja Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.11
Penghargaan Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2023

No.	Peringkat, Kategori, dan Jenis Penghargaan	Skala	Peraih	Pemberi Penghargaan	Sumber Data	Keterangan
1	**Kabupaten Sangat Inovatif pada *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2023**	Nasional	Pemerintah Kabupaten Blitar	Kemendagri	SK Mendagri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023	Merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat pada kinerja pemerintah daerah serta untuk menumbuhkan iklim kompetitif antar daerah melalui inovasi.

Sumber : Bappedalitbang, 2023.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar pada tahun anggaran 2023, di dukung dengan Anggaran Perubahan sebesar **Rp. 12.218.137.766,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.621.428.140,00	2.292.725.832,00	87,46
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.685.000,00	34.845.250,00	90.07
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.685.000,00	34.845.250,00	90.07
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.540.000,00	17.580.000,00	48,11
2.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36.540.000,00	17.580.000,00	48,11
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	437.723.000,00	265.420.333,00	60,64
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	437.723.000,00	265.420.333,00	60,64
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.415.712.620,00	1.309.986.048,00	92,53
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.052.500,00	5.050.000,00	99,95

4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	280.801.100,00	276.062.800,00	98,31
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.207.900,00	20.165.320,00	99,79
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.583.000,00	19.527.500,00	99,72
4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	218.956.750,00	156.299.500,00	71,38
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.875.000,00	1.800.000,00	96,00
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	869.236.370,00	831.080.928,00	95,61
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	510.478.520,00	488.474.883,00	95,69
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000,00	1.566.363,00	52,21
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	507.478.520,00	486.908.520,00	95,95
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.289.000,00	176.419.318,00	96,78
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.325.000,00	75.468.318,00	98,88
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.320.000,00	100.951.000,00	99,64
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.644.000,00	0,00	0,00
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.694.484.700,00	1.510.710.941,00	89,15

1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.014.143.800,00	947.712.520,00	93,45
1.1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	101.852.500,00	81.223.500,00	79,75
1.2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	179.171.000,00	179.171.000,00	100,00
1.3	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	42.886.500,00	42.886.500,00	100,00
1.4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	690.233.800,00	644.431.520,00	93,36
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	183.851.100,00	119.851.130,00	65,19
2.1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	73.768.000,00	59.920.560,00	81,23
2.2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	110.083.100,00	59.930.570,00	54,44
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	496.489.800,00	443.147.291,00	89,26
3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	123.800.800,00	85.305.591,00	68,91
3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	372.689.000,00	357.841.700,00	96,02

III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.399.977.160,00	1.101.456.983,00	78,68
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	565.769.960,00	409.666.782,00	72,41
1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26.827.250,00	25.494.559,00	95,03
1.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	119.414.350,00	102.418.519,00	85,77
1.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42.254.650,00	23.482.029,00	55,57
1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	377.273.710,00	258.271.675,00	68,46
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	332.559.000,00	242.342.037,00	72,87
2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.569.000,00	21.449.000,00	52,87
2.2	Koordinasi Pelaksanaan	76.200.000,00	40.065.356,00	52,58

	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.730.000,00	42.746.993,00	84,26
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	165.060.000,00	138.080.688,00	83,65
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	501.648.200,00	449.448.164,00	89,59
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	126.584.200,00	105.459.977,00	83,31
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	173.240.000,00	163.566.900,00	94,42
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	123.364.000,00	117.639.178,00	95,36
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	78.460.000,00	62.782.109,00	80,02
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.412.700.000,00	2.241.359.352,00	92,90
1	Penelitian dan Pengembangan	777.700.000,00	726.407.892,00	93,40

	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	357.700.000,00	316.921.090,00	88,60
1.2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	20.000.000,00	19.974.750,00	99,87
1.3	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	400.000.000,00	389.512.052,00	97,38
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	500.000.000,00	499.695.000,00	99,94
2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
2.2	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	300.000.000,00	299.695.000,00	99,90
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	150.000.000,00	149.900.000,00	99,93
3.1	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	150.000.000,00	149.900.000,00	99,93
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	985.000.000,00	865.356.460,00	87,85
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	451.751.000,00	421.392.973,00	93,28
4.2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan	333.249.000,00	272.981.795,00	81,92

	Teknologi			
4.3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	100.000.000,00	85.823.970,00	85,82
4.4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	50.000.000,00	49.426.000,00	98,85
4.5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	50.000.000,00	35.731.722,00	71,46
	Total	8.128.590.000,00	7.146.253.108,00	87,91

Sumber : Bappedalitbang, 2023

Realisasi anggaran pada tahun 2023 pada program/kegiatan tersebut diatas hampir memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar sudah BAIK.

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada bab III, maka dapat disampaikan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik** dan **Sangat Baik.** Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Sasaran 1 : Persentase capaian klinerja RPJMD, tercapai sebesar 112.94% atau dengan kategori **Sangat Baik**; Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%, tercapai sebesar 121.33% atau dengan kategori **Sangat Baik.**
2. Capaian kinerja Sasaran 2 : Skor SAKIP Bappeda tercapai sebesar 100% atau dengan kategori **Sangat Baik**;
3. Capaian kinerja Sasaran 3: Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti, tercapai sebesar 140% atau dengan kategori **Sangat Baik.**

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar tahun 2023, terdapat beberapa rencana startegis yang dirancang untuk mencapai target kinerja pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

a. Penyusunan Rankhir RPJPD 2025-2045.
b. Penyusunan Ranwal RKPD, RKPD, dan Perubahan RKPD.

c. Pelaksanaan Krenotek dan Inovasi.

d. Pelaksanaan KISS Sektoral.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Blitar, 28 Maret 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, ME.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750902 199412 1 002